

Jakarta, 6 Juni 2024  
Nomor: 022/SEKBER/2024/VI

Kepada Yth.  
**Zulfan Taufik**  
UIN Bukittinggi, Pelita Bukittinggi  
Di Tempat

Hal: **Undangan Narasumber Diskusi: “Memperkuat Toleransi Melalui Indeks Kota Toleran: Pengalaman SETARA Institute”**

Dengan hormat,

Salah satu pilar terbesar dalam advokasi kebebasan beragama atau berkeyakinan (KBB) di Indonesia pasca-Reformasi adalah bagaimana membangun lingkungan dan komunitas yang menjunjung nilai-nilai toleransi. Sejak tahun 2015 SETARA Institute secara rutin menyusun dan merilis Indeks Kota Toleran, sebuah laporan studi pengukuran kinerja kota yang ditujukan untuk mempromosikan pembangunan dan pembinaan ruang-ruang toleransi di kota yang dilakukan oleh pemerintah kota setempat dan/atau didukung serta berkolaborasi bersama elemen masyarakat secara umum.

Untuk mempelajari tulisan di atas, Diskusi Virtual Bulanan Juni 2024 mengambil tema “Memperkuat Toleransi Melalui Indeks Kota Toleran: Pengalaman SETARA Institute.” Diskusi akan fokus pada upaya SETARA Institute untuk memperkuat toleransi melalui pengeluaran laporan studi indeks tersebut.

Sesuai dengan kesepakatan awal dengan Bapak Zulfan dengan Bapak Ihsan, kami mengundang Bapak menjadi narasumber yang memantik diskusi tersebut. Diskusi akan dilaksanakan secara virtual pada:

Hari/Tanggal: Jumat, 21 Juni 2024

Waktu: Pukul 14:00-16:00 WIB

Tempat: Zoom (terlampir)

Informasi lebih rinci mengenai kegiatan ini kami sampaikan dalam ToR sebagaimana terlampir.

Demikian surat ini kami buat. Atas kesediaannya kami haturkan banyak terimakasih.

Salam,



Ihsan Ali-Fauzi  
Koordinator Nasional

Kerangka Acuan Kegiatan

**Diskusi Virtual Bulanan**  
**“Memperkuat Toleransi Melalui Indeks Kota Toleran:**  
**Pengalaman SETARA Institute”**

Sekretariat Bersama  
Koalisi Advokasi KBB Indonesia

Jumat, 21 Juni 2024, pukul 14:00-16:00 WIB

**Latar Belakang**

- Salah satu pilar terbesar dalam advokasi kebebasan beragama atau berkeyakinan (KBB) di Indonesia pasca-Reformasi adalah bagaimana membangun lingkungan dan komunitas yang menjunjung nilai-nilai toleransi. Nilai-nilai tersebut baiknya tidak hanya dicerminkan melalui perilaku sehari-hari, namun juga dilindungi dalam peraturan daerah masing-masing wilayah.
- Sejak tahun 2015 SETARA Institute secara rutin menyusun dan merilis Indeks Kota Toleran, sebuah laporan studi pengukuran kinerja kota, meliputi pemerintah kota dan elemen masyarakat dalam mengelola keberagaman, toleransi, dan inklusi sosial. Studi tersebut ditujukan untuk mempromosikan pembangunan dan pembinaan ruang-ruang toleransi di kota yang dilakukan oleh pemerintah kota setempat dan/atau didukung serta berkolaborasi bersama elemen masyarakat secara umum.
- Dalam definisi SETARA, kota toleran adalah kota yang memiliki visi dan rencana pembangunan inklusif, regulasi yang kondusif bagi praktik dan promosi toleransi, kepemimpinan yang progresif bagi praktik dan promosi toleransi, tingkat intoleransi dan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan rendah, dan upaya berkelanjutan dalam mengelola keberagaman dan inklusi sosial. Respon dari berbagai kota terhadap peringkatnya dalam indeks cukup beragam dan menarik untuk didiskusikan lebih lanjut.
- Berbagai ragam pendekatan dalam mengatasi pelanggaran hak beragama perlu didiskusikan dan dipelajari bersama oleh anggota Koalisi Advokasi KBB. Seperti diketahui, Koalisi Advokasi KBB Indonesia dibentuk sebagai usaha memperkokoh jaringan antarorganisasi yang bergerak dalam advokasi KBB serta memperkuat legitimasi gerakan kolektif advokasi KBB di Indonesia.
- Salah satu mandat Sekretariat Bersama untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah untuk memfasilitasi diskusi dan pertukaran ide di antara anggota serta memfasilitasi pertukaran pengalaman dan pengembangan kajian-kajian. Kegiatan virtual bulanan ini merupakan upaya Sekber Koalisi Advokasi KBB untuk menjalankan mandat tersebut.

## Tujuan

- Mempelajari dan merefleksikan pengalaman dan upaya SETARA Institute dalam penguatan toleransi melalui Indeks Kota Toleran (IKT).
- Memperkuat basis pengetahuan dan keterampilan para anggota dalam advokasi KBB melalui proses diskusi dan saling berbagi.

## Tema dan Pertanyaan Diskusi

- Diskusi kali ini akan membahas tema “Memperkuat Toleransi Melalui Indeks Kota Toleran: Pengalaman SETARA Institute.”
- Beberapa pertanyaan diskusi: Selama ini SETARA Institute mengupayakan penguatan toleransi melalui Indeks Kota Toleran (IKT). Mengapa dan bagaimana IKT bisa memperkuat toleransi? Apa kekuatan dan keterbatasannya? Apa yang bisa dipelajari dari dan dilakukan melalui IKT untuk penguatan toleransi di berbagai kota/kabupaten di Indonesia?

## Pemantik Diskusi

1. Halili Hasan (SETARA Institute)
2. Wiwin S.A. Rohmawati (Dosen Universitas Islam Darussalam, Ciamis & anggota FKUB Yogyakarta)
3. Zulfan Taufik (Dosen UIN Bukittinggi, Pelita Bukittinggi)
4. Alifa Ardhyasavitri (Koalisi Advokasi KBB Indonesia), Moderator Acara

## Waktu, Tempat, dan Bacaan

- Hari: Jumat, 21 Juni 2024, pukul 14:00-16:00 WIB
- Link Zoom: <https://bit.ly/diskusiKBB-08>
- Bahan Diskusi: <https://bit.ly/bahandiskusiKBB-08>
- Diskusi akan disiarkan langsung lewat akun YouTube PUSAD Paramadina
- Rundown: terlampir

## Lainnya

- Acara ini didukung antara lain oleh: Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), Yayasan Paramadina (PUSAD Paramadina); The Asia Foundation; Program Studi Agama dan Lintas Budaya, Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada (CRCS UGM); Intersectoral Collaboration for Indigenous Studies (ICIR); Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI); Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS).
- Untuk informasi lebih jauh mengenai acara ini, silakan hubungi: WA +62 878-3839-9544 / email [sekber.kbb@gmail.com](mailto:sekber.kbb@gmail.com).

Lampiran 1: Rundown Acara

Susunan Acara  
Diskusi Virtual Bulanan

**“Memperkuat Toleransi Melalui Indeks Kota Toleran:  
Pengalaman SETARA Institute”**

Koalisi Advokasi KBB Indonesia

Jumat, 21 Juni 2024, pukul 14.00-16.00 WIB

<b>Waktu (menit)</b>	<b>Acara</b>	<b>Keterangan (Petugas)</b>
13:45-14:00 WIB (15')	Aplikasi Zoom mulai dibuka dan berjalan	Sekber (Muhammad Agung Saputro)
14:00-14:10 WIB (10')	Pembukaan dan pengantar	Moderator: Alifa Ardhyasavitri (Koalisi Advokasi KBB)
14:10-14:30 WIB (20')	Presentasi “Memperkuat Toleransi Melalui Indeks Kota Toleran: Pengalaman SETARA Institute”	Halili Hasan (SETARA Institute)
14:30-14:40 WIB (10')	Komentar terhadap presentasi “Memperkuat Toleransi Melalui Indeks Kota Toleran: Pengalaman SETARA Institute”	Wiwin S.A. Rohmawati (Dosen Universitas Islam Darussalam, Ciamis & anggota FKUB Yogyakarta)
14:40-14:50 WIB (10')	Komentar terhadap presentasi “Memperkuat Toleransi Melalui Indeks Kota Toleran: Pengalaman SETARA Institute”	Zulfan Taufik (Dosen UIN Bukittinggi, Pelita Bukittinggi)
14:50-16:00 WIB (70')	Diskusi	Moderator: Alifa Ardhyasavitri (Koalisi Advokasi KBB)

## Memperkuat Toleransi Melalui Indeks Kota Toleran: Pengalaman SETARA Institute

Selama ini SETARA Institute mengupayakan penguatan toleransi melalui Indeks Kota Toleran (IKT). Mengapa dan bagaimana IKT bisa memperkuat toleransi? Apa kekuatan dan keterbatasannya? Apa yang bisa dipelajari dari dan dilakukan melalui IKT untuk penguatan toleransi di berbagai kota/kabupaten di Indonesia?

### Pemantik



**Halili Hasan**  
(SETARA Institute)



**Wiwin S.A. Rohmawati**  
(Dosen Universitas Islam Darussalam, Ciamis,  
dan anggota FKUB Yogyakarta)



**Zulfan Taufik**  
(Dosen UIN Bukittinggi, Pelita Bukittinggi)



**Alifa Ardhya**  
(Koalisi Advokasi KBB, Moderator)

Jumat, 21 Juni 2024  
Pukul 14.00-16.00 WIB.



Link Registrasi Zoom:  
[bit.ly/diskusiKBB-08](https://bit.ly/diskusiKBB-08)



Bahan diskusi dapat diunduh di:  
[bit.ly/bahandiskusikbb-08](https://bit.ly/bahandiskusikbb-08)

Disiarkan langsung melalui Youtube  
PUSAD Paramadina.

Gratis e-sertifikat bagi yang berminat.

Informasi lebih lanjut silakan hubungi: WA +6287838399544 atau melalui email: [sekber.kbb@gmail.com](mailto:sekber.kbb@gmail.com)



Koalisi Advokasi KBB



KoalisiKBB



koaliskbb

Didukung oleh:



ICT Slides untuk Perubahan\_Halil\_Hasan\_Seliler\_KBB\_21042023

Home Insert Draw Design Transitions Animations Slide Show Review View Recording

Slide 1: **Indeks Kota Toleran (IKT): Mendorong Perubahan untuk Pemajuan Toleransi**

Halil Hasan  
Direktur Eksekutif SETARA Institute  
Email: halil.yusuf@gmail.com



**Catatan Kritis**  
**Diskusi Indeks Kota Toleran SETARA Institute**

*Jum'at, 21 Juni 2024*

1. Terima kasih untuk Sekber KBB yg sudah mengikutsertakan saya dalam diskusi bulanan Koalisi KBB. Ini kedua kalinya, setelah yang pertama berbicara terkait pangalaman pemuda lintas agama di Sumbar dalam isu KBB. Salam hormat untuk para guru, narasumber, dan semua kawan yang hadir dalam forum Zoomiyah ini.
2. Apresiasi tinggi untuk SETARA Institute untuk dedikasi dan konsistensinya yang luar biasa dalam membuat indeks tahunan terkait kota toleran, sejak 2015-2023. Indeks yang sudah menggunakan metodologi ilmiah dengan baik.
3. IKT ini sering menjadi bahan pembicaraan oleh Kemenag dan para tokoh lintas agama (FKUB) di daerah-daerah, ketika saya melakukan riset terkait kerukunan di beberapa kota, baik dalam konteks positif maupun negatif. Menjadi kebanggaan bagi kota yang memiliki indeks tinggi seperti Surakarta dan Manado, dan menjadi *ceme'eh* (olok-olokan dan kecurigaan) di wilayah yang memiliki indeks rendah, seperti Sumbar (Padang/Bukittinggi) dan Mataram.
4. Pengalaman awal bersentuhan dengan IKT SETARA Institute adalah pada awal tahun 2019 ketika diminta membedah hasil IKT tahun 2018 di hadapan FKUB, Pemkot, dan akademisi di Kota Bukittinggi. Waktu itu sedang ramai di Sumbar tentang Indeks KUB Kemenag yang menempatkan Sumbar di peringkat 2 terbawah, dan IKT yg menempatkan Padang, Pariaman, dan Pdg Panjang di 10 besar terbawah, serta Bukittinggi di peringkat 83.
5. Responnya negatif terhadap indeks-indeks tersebut. Mereka mempertanyakan rincian data dan argumen dari setiap angka (skoring) di masing variabel (indikator/rubrik). Apakah SETARA ada memberikan data rinci ke masing-masing kota dari setiap variabel (indikator/rubrik) yang diukur? Namun dalam pengalaman Bukittinggi, meski pernah ada drama terkait respon terhadap indeks-indeksan ini, indeksnya naik cukup drastis. Lebih dari 30 peringkat. Mereka memperbanyak pemberitaan media online terkait kegiatan-kegiatan lintas agama dan kebudayaan yang dilakukan oleh FKUB dan Pemkot. Saat ini ada di peringkat 52.
6. **Hal substansi perdebatan:** Pemaknaan/persepsi dan tolok ukur "toleransi" yang tidak sama. SETARA menggunakan kerangka Grim dan Finke (2006) "International Religion Indexes": favoritisme agama, regulasi pemerintah, dan regulasi sosial, **yang ditambahkan** dengan variabel demografi sosial-keagamaan. Indikator "tambahan" ini sering menjadi pertanyaan di wilayah kami yang tingkat homogenitasnya sangat tinggi.
7. Setiap wilayah memiliki baseline berbeda dan keunikan masing-masing, terutama terkait heterogenitas demografis warga kotanya. Sehingga menjadi "kurang fair" bagi wilayah yang tingkat heterogenitasnya rendah, seperti Padang (96% Muslim) dan Banda Aceh (98%). Karenanya, tuntutan politik identitas keagamaan dan favoritisme agama sulit dihindari oleh penguasa kotanya. Asumsinya, semakin homogen, maka akan semakin sulit membuat kebijakan yang inklusif.
8. Penggunaan kerangka Grim dan Finke untuk mengukur kota toleran, akan menyamakan dan menggabungkan konsep toleransi beragama dan kebebasan beragama (KBB). Ada ambiguitas makna toleransi dengan KBB. Meskipun kedua konsep tersebut memiliki landasan yang sama dalam menghormati keberagaman agama dan mendorong hidup berdampingan secara damai, toleransi beragama menekankan pada sikap dan perilaku sosial, sedangkan kebebasan beragama mencakup perlindungan hukum dan hak-hak individu.
9. Kedua konsep tersebut memiliki implikasi berbeda. **Kebebasan Beragama:** Menyiratkan sikap proaktif di mana hukum melindungi individu dari diskriminasi atau pembatasan berdasarkan keyakinan atau praktik agama mereka. Sedangkan **Toleransi Beragama:** Melibatkan sikap penerimaan dan rasa hormat yang lebih pasif, mendorong hidup berdampingan secara damai dan saling memahami tanpa memerlukan perlindungan hukum.
10. Pada umumnya masyarakat (Sumbar) memahami bahwa toleransi adalah menenggang kehadiran kelompok lain secara pasif, dan kerukunan adalah ketiadaan konflik terbuka dan ketiadaan gangguan langsung terhadap kelompok berbeda. Toleransi bukan dalam konteks mengakomodasi hak-hak dan kebebasan beragama secara aktif dalam kebijakan pemerintah dan sosial. Sehingga ketika mereka dikatakan intoleran (indeks toleransinya rendah) dibanding kota-kota lain, maka itu sangat mengganggu dan mencederai harga dirinya.
11. Karenanya, Favoritisme agama dalam kebijakan pemerintah, bagi masyarakat Sumbar, bukanlah merupakan intoleransi, melainkan bagian integral dari penghargaan terhadap identitas kebudayaan masyarakat lokal (ABS-SBK). Misalnya terkait pembatalan SKB 3 Menteri terkait seragam sekolah, melalui tuntutan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumbar. Dimana kebijakan nasional (HAM Universal) diperhadapkan dengan hak kultural dan adat istiadat, serta kedaulatan (otonomi) pendidikan dan kebudayaan, yang juga dilindungi dalam HAM.

# Indeks Kota Toleran (IKT): Mendorong Perubahan untuk Pemajuan Toleransi

---

Halili Hasan

*Direktur Eksekutif SETARA Institute*

Email: [halili.yasu@gmail.com](mailto:halili.yasu@gmail.com)

IG: [halili\\_syndicate](#)



# Indeks Kota Toleran (IKT)

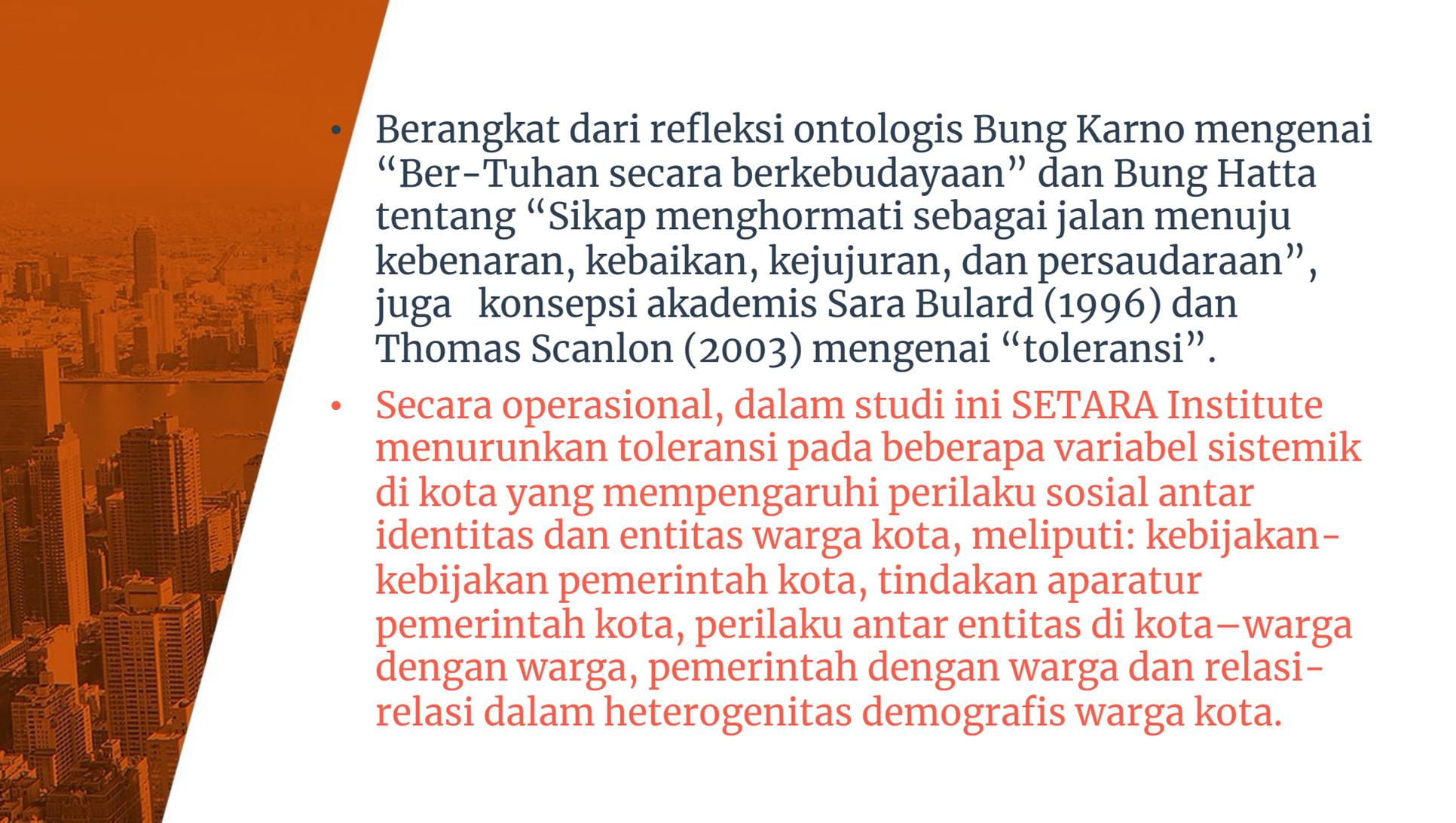
Setara Institute melakukan kajian dan *indexing* terhadap 94 kota di Indonesia dalam hal isu promosi dan praktik toleransi

Tujuan pengindeksan antara lain untuk mempromosikan kota-kota yang dianggap berhasil membangun dan mengembangkan toleransi di wilayahnya masing-masing, sehingga dapat menjadi pemicu bagi kota-kota lain untuk turut bergegas mengikuti, membangun dan mengembangkan toleransi di wilayahnya

Toleransi merupakan salah satu variabel kunci dalam membina dan mewujudkan kerukunan dan inklusi sosial, serta membangun Negara Pancasila yang bersendikan kemajemukan

# Kerangka konseptual



- 
- Berangkat dari refleksi ontologis Bung Karno mengenai “Ber-Tuhan secara berkebudayaan” dan Bung Hatta tentang “Sikap menghormati sebagai jalan menuju kebenaran, kebaikan, kejujuran, dan persaudaraan”, juga konsepsi akademis Sara Bulard (1996) dan Thomas Scanlon (2003) mengenai “toleransi”.
  - Secara operasional, dalam studi ini SETARA Institute menurunkan toleransi pada beberapa variabel sistemik di kota yang mempengaruhi perilaku sosial antar identitas dan entitas warga kota, meliputi: kebijakan-kebijakan pemerintah kota, tindakan aparaturnya, perilaku antar entitas di kota-warga dengan warga, pemerintah dengan warga dan relasi-relasi dalam heterogenitas demografis warga kota.

## PROGRESSION OF INCLUSION

A social-emotional pathway to kinder, fairer, and more inclusive families, schools, and communities

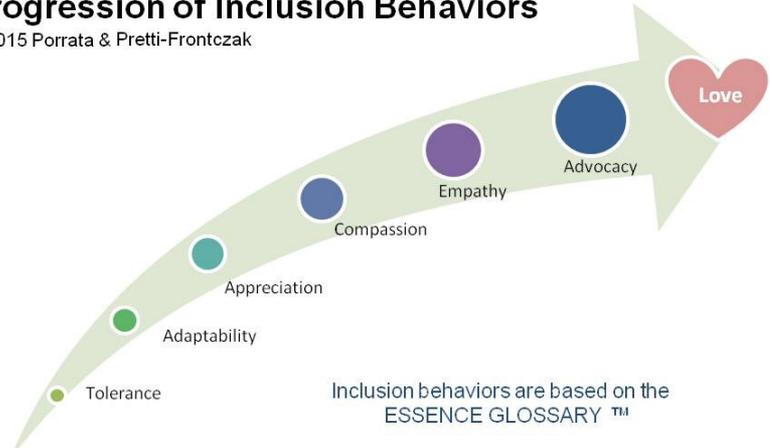


©2015-2019 All rights reserved. Porrata & Pretti-Frontczak  
ESSENCEGLOSSARY.COM

# Kerangka Teoretis dan Praktis

## Progression of Inclusion Behaviors

© 2015 Porrata & Pretti-Frontczak



“Inclusive Education Concepts” <https://prekteachandplay.com>

# KERANGKA TOLERANSI - SETARA Institute



**Inklusi**

**Rekognisi**

**Akseptasi**

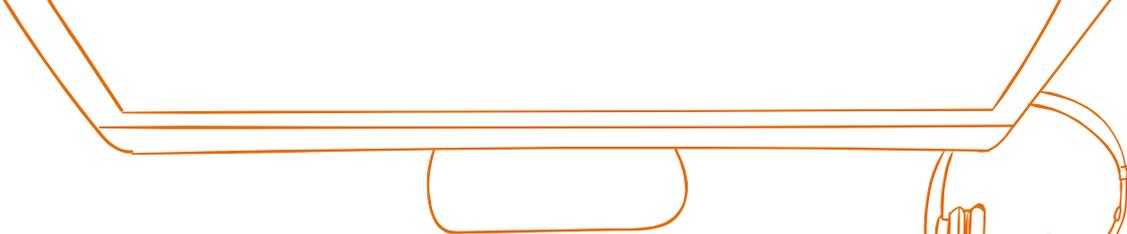
Yang dimaksud dengan kota toleran dalam studi ini adalah kota yang memiliki beberapa atribut berikut:

- 1) Pemerintah kota tersebut memiliki visi, rencana pembangunan, serta kebijakan yang inklusif, mendukung keberagaman, serta mempraktikkan dan memajukan toleransi, baik dalam bentuk perencanaan maupun pelaksanaan;
- 2) Pernyataan dan tindakan apparatus pemerintah kota tersebut kondusif bagi praktik dan promosi toleransi;
- 3) Di kota tersebut peristiwa intoleransi dan tindakan-tindakan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan rendah atau tidak ada sama sekali; dan
- 4) Kota tersebut menunjukkan upaya yang memadai dalam tata kelola keberagaman identitas warganya.

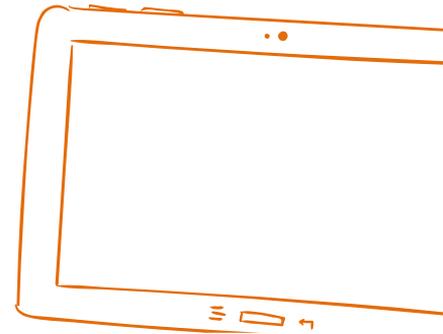
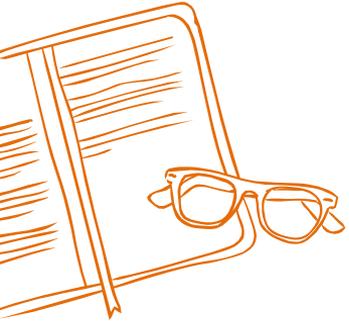
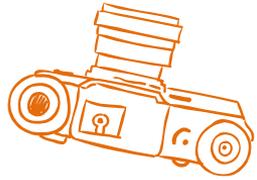


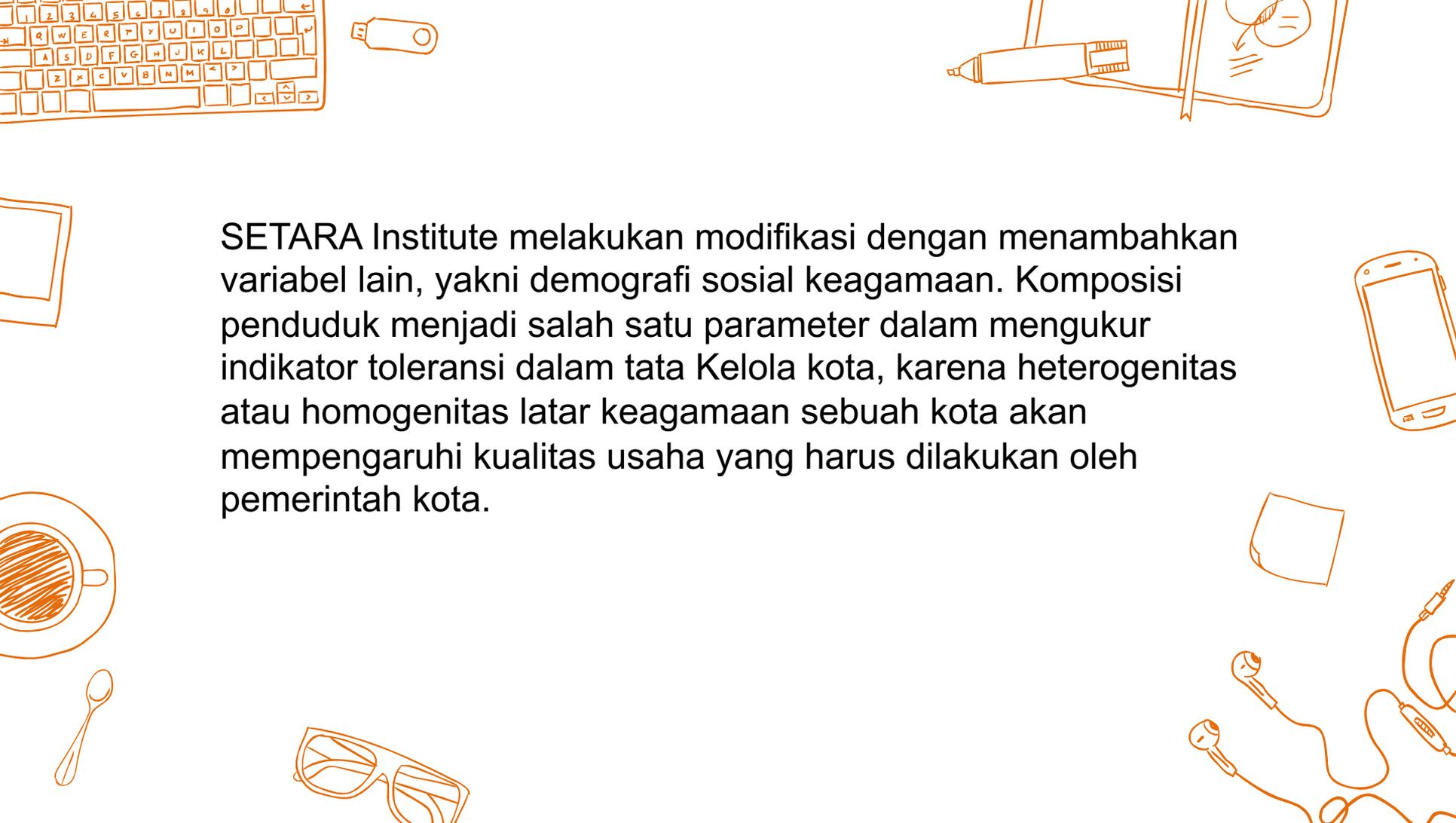
# Kerangka metodologis





Indeks Kota Toleran mengadopsi kerangka Brian J. Grim dan Roger Finke (2006) dalam pengukuran tingkat kebebasan beragama atau **derajat toleransi sebuah negara**. Dalam kerangka ini, Grim dan Finke menyusun 3 indikator utama untuk mengukur tingkat kebebasan beragama atau derajat toleransi. **Pertama**, favoritisme atau pengistimewaan pemerintah terhadap kelompok-kelompok agama tertentu. **Kedua**, peraturan pemerintah yang membatasi kebebasan beragama. **Ketiga**, regulasi sosial yang membatasi kebebasan beragama.





SETARA Institute melakukan modifikasi dengan menambahkan variabel lain, yakni demografi sosial keagamaan. Komposisi penduduk menjadi salah satu parameter dalam mengukur indikator toleransi dalam tata Kelola kota, karena heterogenitas atau homogenitas latar keagamaan sebuah kota akan mempengaruhi kualitas usaha yang harus dilakukan oleh pemerintah kota.

# Variabel dan Indikator



01

## Regulasi Pemerintah Kota

- (a) Rencana Pembangunan dalam bentuk RPJMD & produk hukum lainnya
- (b) Kebijakan Diskriminatif

02

## Tindakan Pemerintah

- (a) Pernyataan pejabat kunci tentang peristiwa intoleransi
- (b) Tindakan nyata terkait peristiwa

03

## Regulasi Sosial

- (a) Peristiwa Intoleransi
- (b) Dinamika masyarakat sipil terkait peristiwa intoleransi

04

## Demografi Sosial-Keagamaan

- (a) Heterogenitas keagamaan Penduduk
- (b) Inklusi Sosial Keagamaan

# EMPAT Variabel dan Prosentase

Regulasi Pe  
merintah  
(30%)

Regulasi  
Sosial  
(30%)

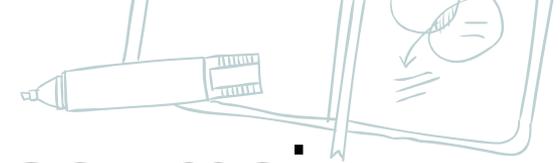
Tindakan Pe  
merintah  
(25%)

Demogr  
afi Sosial  
keagama  
an  
(15%)

Pembobotan mempertimbangkan perbedaan tingkat pengaruh masing-masing indikator pengukuran terhadap situasi faktual toleransi di kota.

# Delapan indikator dan persentase

INDIKATOR	PERSENTASE	INDIKATOR	PERSENTASE
RPJMD	10	Pernyataan Kepada Publik	10
Kebijakan Pemkot	20	Tindakan Nyata	15
Peristiwa Intoleransi	20	Heterogenitas Agama	5
Dinamika Masy Sipil	10	Inklusi Sosial Keagamaan	10



# Scoring, objek, dan asumsi



## SCORING

Skala Numerik 1-7

Spektrum buruk > baik.

1 merupakan *scoring* untuk situasi buruk pada masing-masing indikator untuk mewujudkan kota toleran, sedangkan 7 adalah *scoring* untuk situasi baik pada masing-masing indikator untuk mewujudkan kota toleran tersebut.



## OBJEK

94 dari 98.

Penggabungan kota-kota administratif di DKI Jakarta menjadi Jakarta, karena kota-kota tersebut tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak valid untuk dinilai secara terpisah.

## ASUMSI

Komposisi penduduk di perkotaan lebih heterogen. Heterogenitas tersebut meniscayakan tingkat dan tata kelola toleransi yang tinggi dan baik.





# Validitas dan Reliabilitas

Untuk menjamin validitas data hasil *scoring*, SETARA melakukan **triangulasi sumber** yang dilakukan dengan membandingkan data *scoring* awal dengan data-data **desk study** dan **self-assessment** masing-masing pemerintah kota.

SETARA juga mengadakan **pertemuan para ahli** dan wawancara online bersama masyarakat sipil di kota-kota untuk mengonfirmasi data hasil *scoring*.

Pengukuran yang dilakukan SETARA Institute dalam laporan ini menggunakan paradigma campuran: Hak negatif dan tindakan positif pemerintah kota dalam mempromosikan toleransi sesuai indikator yang ditetapkan dalam IKT.

# Data Gathering dan Indexing Process

- IKT= Semi komposit
  - Indikator satu: Indexing oleh tim peneliti IKT
  - Indikator dua: Data Komnas Perempuan dan Data SETARA
  - Indikator tiga: Data KBB SETARA Institute
  - Indikator empat: Indexing oleh tim peneliti IKT
  - Indikator lima: Indexing oleh tim peneliti IKT
  - Indikator Enam: Indexing oleh tim peneliti IKT
  - Indikator Tujuh: Data BPS
  - Indikator delapan: Indexing oleh tim peneliti IKT
- Kontrol proses indexing: Rubrik dan Parameter



# Resonansi dan Dampak IKT ...

**Jumlah** : 833 pemberitaan  
**Media online** : 449  
**Media Sosial** : 384 (Instagram, FB, Tiktok, Twitter/X, Youtube)  
**Periode** : 30 Januari – 24 Februari 2024

## LINKS :

1. <https://www.voaindonesia.com/a/setara-institute-singkawang-paling-toleran-sabang-paling-tidak-toleran/7464023.html>
2. <https://www.dw.com/en/indonesia-why-acehs-cities-rank-low-in-tolerance/a-68309162>
3. <https://jakartaglobe.id/lifestyle/singkawang-retains-title-as-indonesias-most-tolerant-city>
4. <https://regional.kompas.com/read/2024/02/02/055000278/depok-banda-aceh-dan-padang-masuk-daftar-kota-toleransi-terendah-versi>
5. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/01/30/kota-singkawang-kota-paling-toleran-surakarta-meloro-jadi-urutan-ke-10>
6. <https://regional.kompas.com/read/2024/02/01/050300978/peringkat-kota-toleran-solo-turun-drastis-dari-rangking-4-jadi-10>
7. <https://www.kompas.com/tren/read/2024/01/31/083000065/10-daftar-kota-paling-toleran-dan-intoleran-di-indonesia-2023-versi-setara>
8. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/02/09/manado-toleran-tak-berarti>



# Resonansi dan Dampak IKT ...

- Evaluasi, asesemen, dan advokasi berbasis partisipasi masyarakat sipil, nasional atau lokal, meningkat.
- Antusiasme Pemerintah secara umum meningkat.





Terima Kasih